



Ilustrasi: Chandra Hadi Romaita

Rezim Para Penyangkal

*Pengaruh Kelompok Penyangkal
Perubahan Iklim terhadap Kebijakan Politik
Amerika Serikat di Bidang Lingkungan*

Kenny Setya Abdiel dan Muhammad Respati Harun

Abstrak

Menurut Peter Hough, permasalahan lingkungan hidup adalah salah satu isu yang harus disekuritisasi. Sekuritisasi adalah proses menjadikan suatu isu menjadi isu yang harus dipandang sebagai suatu ancaman terhadap eksistensi. Ia tidak dapat lagi dipandang sebagai bagian yang terpisah dari manusia karena terjadi hubungan saling memengaruhi di antara keduanya. Namun, upaya sekuritisasi tersebut terhambat karena munculnya kelompok-kelompok yang menyangkal adanya perubahan iklim. Kelompok tersebut muncul di sejumlah negara, salah satunya adalah Amerika Serikat (AS). Menurut Jean-Daniel Collomb, besarnya pengaruh yang dimiliki kelompok penyangkal dapat memengaruhi pembentukan kebijakan dalam dan luar negeri AS. Dalam artikel ini, kami akan mendedah bagaimana kelompok penyangkal perubahan iklim dapat mempengaruhi kebijakan politik dalam dan luar negeri AS, terutama di bidang lingkungan. Dari sana, kami akan menjelaskan bagaimana AS di bawah Donald Trump menjadi sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan pada rezim Barack Obama. Tidak sedikit kebijakan Trump yang memengaruhi upaya sekuritisasi lingkungan, apalagi ketika mengingat AS merupakan salah satu negara penyumbang gas karbon terbesar. Salah satu contoh terkini yang menggambarkan hal tersebut adalah keluarnya AS dari Perjanjian Paris.

Kata kunci: Penyangkal perubahan iklim, Amerika Serikat, sekuritisasi,

Pendahuluan

"Dalam rangka memenuhi tugas saya dalam melindungi Amerika Serikat (AS) dan rakyatnya, kami akan mundur dari Persetujuan Paris."¹ Demikian salah satu kutipan dalam pidato Donald Trump, Presiden AS, pada 1 Juni 2017. Pidato yang dilakukan di Rose Garden Gedung Putih tersebut secara resmi menandai keluarnya AS dari Persetujuan Paris yang sebelumnya disepakati pada 12 Desember 2015. Namun, berdasarkan peraturan di Persetujuan Paris, AS baru akan benar-benar keluar secepatnya pada 4 November 2020.²

Keluarnya AS dari Persetujuan Paris merupakan kabar yang cukup mengejutkan. Pasalnya, pada masa kepemimpinan Barack Obama, AS merupakan salah satu negara yang paling bersemangat dalam menandatangani persetujuan tersebut. Pada saat itu, AS mengikuti Persetujuan Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26-28% pada 2025.³ AS pada masa kepemimpinan Obama juga menggunakan kekuatannya untuk memberlakukan sebanyak mungkin pengurangan gas karbon dalam rangka mewujudkan target

1. The White House. "Statement by President Trump on the Paris Climate Accord," (<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/01/statement-president-trump-paris-climate-accord>, diakses 21 Oktober 2017).

2. Brad Plumer, "The U.S. Won't Actually Leave the Paris Climate Deal Anytime Soon," (<https://www.nytimes.com/2017/06/07/climate/trump-paris-climate-timeline.html>, diakses 25 Oktober 2017).

3. Rebecca Harrington, "Here's what the US actually agreed in the Paris Climate Deal," (<http://www.businessinsider.sg/what-did-us-agree-to-paris-climate-deal-2017-5/?r=US&IR=T>, diakses 25 Oktober 2017).

Persetujuan Paris yang secara tidak langsung menempatkan AS sebagai pemimpin dalam koalisi ini.⁴

Sayangnya, di pemerintahan Trump ini, usaha yang telah dibangun oleh pemerintahan Obama terancam gagal karena keberadaan beberapa kelompok yang skeptis dan cenderung menyangkal perubahan iklim. Trump memiliki reputasi sebagai seorang pengusaha yang menyangkal adanya perubahan iklim. Reputasi tersebut dibuktikan dengan adanya 115 *tweet* yang menunjukkan sikap skeptisnya terhadap perubahan iklim.⁵ Reputasi itu semakin dipertegas oleh penunjukan para penyangkal di berbagai posisi strategis. Salah satu contohnya adalah penunjukan Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri AS. Dia adalah mantan Direktur Utama ExxonMobil yang sempat bertentangan dengan ide-ide mengenai kerusakan lingkungan, yaitu ketika dia mendorong adanya izin untuk pengeboran di Arktik.⁶

Dengan demikian, sudah cukup jelas bagaimana posisi politik AS dalam kebijakan terhadap lingkungan hidup. Posisi AS sekarang tidak lain merupakan akumulasi dari paradigma skeptisisme yang berkembang di tingkat domestik. Dalam konteks pembahasan perubahan iklim, paradigma skeptisisme adalah paradigma yang kurang percaya bahwa perubahan iklim itu sungguh terjadi. Mereka berusaha menyangkal bukti-bukti ilmiah yang menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan faktor utama perubahan iklim dan fenomena degradasi

lingkungan lainnya. Tujuan penyangkalan tersebut adalah untuk membatalkan atau setidaknya menghambat kebijakan negara yang berpotensi merugikan aktivitas industri mereka. Maka, tidak heran jika aktor-aktor yang berkecimpung dalam paradigma skeptisisme ini adalah mereka yang menyetujui kebebasan eksploitasi sumber daya alam seperti industri minyak bumi.⁷

Kelompok skeptis yang terdiri dari politisi konservatif dan industrialis ini tidak bisa diremehkan. Menurut kami, mereka memiliki cukup banyak faktor pendukung, mulai dari ilmuwan yang kontra terhadap perubahan iklim hingga media massa yang bisa membentuk opini publik. Keberadaan mereka juga tidak lepas dari adanya donatur yang menyokong mereka. Keterlibatan donatur tersebut tidak lepas dari kepentingan ekonomi terkait dengan isu lingkungan. Kepentingan tersebut membuat mereka “menutup mata dan telinga” terhadap isu perubahan iklim. Dengan posisi politik AS yang demikian dan keberadaan kelompok penyangkal perubahan iklim, upaya sekuritisasi lingkungan akan terhambat.

Konsep mengenai sekuritisasi ini diserap dari kata “*security*” yang berarti keamanan. Istilah itu digunakan untuk membawa suatu isu sebagai hal yang lebih dari sebatas politik.⁸ Oleh karena itu, sekuritisasi bisa dipahami sebagai suatu proses yang lebih ekstrem dari politisasi.⁹ Dalam teori ini, ada tiga spektrum dalam menyikapi suatu isu. Pertama, spektrum nonpolitik yang berarti bahwa

4. *Ibid.*

5. Dylan Matthews, “Donald Trump has tweeted climate change skepticism 115 times. Here’s all of it,” (<https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/6/1/15726472/trump-tweets-global-warming-paris-climate-agreement>, diakses 7 Januari 2018).

6. Mazin Sidahmed, “Climate change denial in the Trump cabinet: where do his nominees stand?” (<https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/15/trump-cabinet-climate-change-deniers>, diakses 25 November 2016).

7. Riley E. Dunlap, *Climate Change Skepticism and Denial: An Introduction*, American Behavioral Scientist, 2013, hlm. 691-692

8. Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner, 1998, 25.

9. *Ibid.*

negara tidak memiliki peran apapun dalam isu tersebut.¹⁰ Kedua, spektrum politik yang bermaksud bahwa isu tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik dan pemerintah dituntut untuk terlibat langsung di dalamnya.¹¹ Ketiga spektrum keamanan yang berarti bahwa isu tersebut bisa menimbulkan ancaman bagi eksistensi sehingga tindakan khusus diperlukan.¹²

Sekuritisasi di bidang lingkungan mulai mencuat pada awal 1970-an yang disebabkan oleh berkurangnya sumber daya. Pada saat itu, Richard Falk, dalam bukunya yang berjudul *This Endangered Planet* (1971), menuliskan bahwa:

“Kita perlu mengubah konsep keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi jika kita ingin menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan.”¹³

Kerusakan lingkungan bisa menjadi ancaman yang serius bagi manusia karena dapat meningkatkan rata-rata temperatur bumi. Meningkatnya temperatur di bumi diduga menjadi penyebab 150.000 kematian manusia per tahun sejak awal 1970-an.¹⁴ Selain itu, kerusakan lapisan ozon yang disebabkan oleh akumulasi gas klorofluorokarbon di lapisan atmosfer telah meningkatkan peluang ancaman terjadinya katarak dan kanker kulit.¹⁵

Dengan demikian, muncul sejumlah pertanyaan yang terlintas dalam pikiran kami. Apa yang melatarbelakangi kemunculan kelompok penyangkal

perubahan iklim? Bagaimana pengaruh kemunculan kelompok tersebut terhadap kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, yang berperan vital karena merupakan salah satu negara penghasil emisi karbon terbanyak? Bagaimana pengaruhnya terhadap upaya sekuritisasi lingkungan hidup?

Upaya Sekuritisasi Isu Lingkungan oleh Dunia

Upaya sekuritisasi di bidang lingkungan sempat diadakan di bawah bayang-bayang Perang Dingin, yaitu sekitar 1970-an dan 1980-an. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah diadakannya United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia, pada 5 – 16 Juni 1972. Konferensi yang dikenal sebagai Konferensi Stockholm ini merupakan konferensi besar yang pertama kali mengangkat isu keamanan lingkungan di tingkat internasional. Konferensi ini juga menjadi titik balik dalam perkembangan politik lingkungan internasional.¹⁶ Meskipun begitu, konferensi ini belum dapat menjadikan isu lingkungan sebagai agenda utama dalam politik internasional.

Konferensi ini menghasilkan berbagai rekomendasi terkait isu lingkungan bagi politik internasional, salah satunya adalah mendorong adanya jaringan internasional yang memantau polusi. Hal tersebut kemudian terwujud dalam terbentuknya United Nations Environment Programme.¹⁷ Selain itu, konferensi tersebut juga menjadi awal dari semua pertemuan

10. *Ibid.*

11. *Ibid.*

12. *Ibid.*

13. Peter Hough, dkk, *International Security Studies: Theory and Practice*, New York: Routledge, 2015, hlm. 212-224.

14. *Ibid.* 214.

15. *Ibid.*

16. United Nations, “United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Conference),” (<https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment>, diakses pada 25 November 2017).

17. Brenda Wilmoth Lerner dan K. Lee Lerner, *Environmental Science: In Context*. Detroit: Gale, 2009, hlm. 801.

internasional yang mengangkat isu lingkungan sebagai permasalahan utama.

Isu lingkungan baru dianggap serius dalam politik internasional ketika Perang Dingin berakhir pada awal 1990-an. Pada saat itu, banyak negara mulai mengadopsi pendekatan baru dalam memahami keamanan internasional. Salah satunya yaitu Amerika Serikat dalam strategi keamanan nasional yang tercantum di manifesto politik luar negeri pada tahun 1994, tercantum bahwa:

“Fenomena transnasional seperti terorisme perdagangan narkoba, kerusakan lingkungan, perkembangan jumlah penduduk, dan gelombang pengungsi telah memberi implikasi keamanan terhadap kebijakan yang diambil oleh Amerika.”¹⁸

Selain Amerika Serikat, Rusia yang merupakan negara pecahan terbesar Uni Soviet juga memperhatikan adanya keamanan lingkungan (*environmental security*). Hal itu ditunjukkan dengan dikeluarkannya deklarasi pada tahun 1994 oleh Komisi Keamanan Lingkungan, komisi bentukan Pemerintah Rusia, yang berbunyi:

“Keamanan lingkungan adalah bentuk perlindungan terhadap lingkungan alam dan kepentingan vital bagi masyarakat dan negara dari ancaman internal dan eksternal; melawan proses dan tren dalam pembangunan yang mengancam kesehatan manusia; keberagaman hayati dan penggunaan ekosistem yang berkelanjutan; dan keselamatan manusia.

Keamanan lingkungan adalah bagian penting dalam keamanan nasional Rusia.”¹⁹

Naiknya isu lingkungan sebagai prioritas keamanan nasional AS dan Rusia menjadi penanda bahwa fokus negara-negara di dunia tidak lagi melulu persoalan keamanan tradisional²⁰. Isu lingkungan yang termasuk bagian dari keamanan manusia (*human security*) mempunyai subject matter yang berbeda dari keamanan tradisional. Bila *subject matter* dari keamanan tradisional adalah negara, maka *human security* menyoal “manusia” sebagai fokusnya. Keamanan lingkungan mencakup banyak hal terkait dengan lingkungan hidup, seperti kerusakan ekosistem, permasalahan energi, permasalahan populasi, permasalahan pangan, permasalahan ekonomi, dan perang, yang dianggap bisa menimbulkan kerusakan lingkungan.²¹

Isu lingkungan baru mendapatkan perhatian serius dalam politik internasional pada pasca berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan bubarnya Uni Soviet. Satu tahun setelah itu, yaitu pada tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengadakan konferensi tingkat tinggi yang mengangkat isu lingkungan yang bernama Earth Summit.

Earth Summit diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada 4 – 14 Juni 1992. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan kepala negara terbesar sepanjang sejarah, karena sebanyak 117 kepala negara dan perwakilan dari 178 negara datang dalam pertemuan ini.²² Selain itu, 2.400 perwakilan dari berbagai organisasi non-pemerintah

18. Peter Hough, *op. cit.*, hlm. 215.

19. *Ibid.*, hlm. 216.

20. Menurut Edward Smith (2015), keamanan tradisional fokus pada negara sebagai objek rujukan utama dalam memahami konsep keamanan. Selain itu, mereka cenderung mengamini keamanan dengan interpretasi ala militer.

21. Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner, 1998, 74-75.

22. The Editors of Encyclopædia Britannica, “United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)” (<https://www.britannica.com/event/United-Nations-Conference-on-Environment-and-Development>), diakses 12 November 2017).

dan sekitar 10.000 jurnalis juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tidak hanya itu, ada forum terpisah yang memberi berbagai rekomendasi bagi pertemuan tersebut yang dihadiri oleh sekitar 17.000 perwakilan dari berbagai organisasi non-pemerintah.²³ PBB mengadakan pertemuan tersebut sebagai respons terhadap isu yang berkembang di kalangan ilmuwan mengenai keberadaan gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer Bumi dan kemudian dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global.²⁴

Hal tersebut diduga terjadi disebabkan oleh industrialisasi bahan bakar fosil selama sekitar seratus tahun terakhir yang telah meningkatkan angka konsentrasi karbon di atmosfer.²⁵ Earth Summit tersebut kemudian menghasilkan sejumlah deklarasi dan konvensi. Di antaranya Deklarasi Rio, Pernyataan Prinsip-Prinsip Hutan, dan Agenda 21. Selain itu, pertemuan tersebut juga menghasilkan dua perjanjian, yaitu Convention on Biological Diversity dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).²⁶

UNFCCC dibentuk untuk melawan perubahan iklim global dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam perjanjian tersebut, ada berbagai poin penting yang bisa diambil. Poin-poin tersebut antara lain:²⁷

- Adanya sumber keuangan tambahan untuk memenuhi tujuan perjanjian

- Meningkatkan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Mekanisme institusional untuk membentuk masyarakat internasional yang dapat menghadapi permasalahan perubahan iklim dalam jangka panjang, yaitu dengan bekerja sama dengan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

IPCC adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk melakukan suatu kajian ilmiah terkait dengan perubahan iklim.²⁸ IPCC dibentuk pada tahun 1988 oleh World Meteorological Organization dan United Nations Environment Programme untuk menunjang para pembuat kebijakan, yaitu pemerintah. IPCC menunjang pemerintah dengan berbagai kajian yang berbasis ilmiah mengenai perubahan iklim beserta dampaknya, dan berbagai opsi untuk adaptasi dan mitigasi.²⁹ Partisipasi IPCC terbuka bagi seluruh negara anggota PBB. Saat ini, IPCC terdiri dari perwakilan 195 negara anggota yang kemudian bertemu pada sesi pleno sebagai proses utama dalam pengambilan kebijakan oleh IPCC.

Pelaksanaan Earth Summit mengharuskan adanya pengawalan terhadap berbagai upaya PBB dalam menghadapi perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan mengadakan United Nations Climate Change Conferences. Pertemuan yang juga dikenal dengan istilah Conference of Parties (COP) tersebut diadakan oleh negara-negara anggota UNFCCC

23. Brenda Wilmoth Lerner dan K. Lee Lerner, *op. cit.*, hlm. 212.

24. Jon C. Lovett, *1997 Kyoto Protocol*, *Journal of African Law*, 2005, hlm. 94-96.

25. *Ibid.*

26. Brenda Wilmoth Lerner dan K. Lee Lerner, *op. cit.*, hlm. 212.

27. Stephanie Meakin, "The Rio Earth Summit: Summary Of The United Nations Conference On Environment And Development," (<http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp317-e.htm>, diakses 12 November 2017).

28. Intergovernmental Panel on Climate Change, "IPCC Factsheet: What is the IPCC?" (http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/factsheets/FS_what_ipcc.pdf, diakses pada 12 November 2017).

29. *Ibid.*

sebagai badan pembentukan kebijakan tertinggi dalam konvensi UNFCCC.³⁰

COP pertama kali diadakan pada 1995 di Berlin, Jerman. Dalam pertemuan itu, negara-negara anggota sepakat untuk bertemu setiap tahun untuk melakukan pengawasan terhadap pemanasan global dan berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh polusi.³¹ Kesepakatan tersebut menyepakati bahwa COP diadakan setiap tahun, kecuali jika negara-negara anggota memutuskan untuk tidak mengadakannya³² atau mengadakannya dua kali dalam setahun.³³ Hingga sekarang, COP telah diselenggarakan sebanyak 23 kali di berbagai kota dan negara yang berbeda pada setiap tahunnya.

Salah satu COP yang paling disorot adalah COP 3 yang digelar di Kyoto, Jepang pada Desember 1997.³⁴ Pertemuan itu menjadi sorotan karena menghasilkan Protokol Kyoto, salah satu perjanjian internasional penting dalam isu lingkungan hidup. Protokol ini menjadi penting karena menyumbang mekanisme yang dapat mendorong investasi yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mempromosikan pembangunan

berkelanjutan di negara berkembang.³⁵ Protokol Kyoto bertujuan mengurangi gas rumah kaca yang berperan dalam perubahan iklim. Meskipun ditandatangani pada 1997, Protokol Kyoto baru dijalankan pada Februari 2005.

Dengan adanya protokol ini, negara maju diwajibkan untuk memotong emisi gas karbonnya sebesar 5,2% pada 2012 jika dibandingkan dengan besaran gas karbon pada 1990.³⁶ Tetapi, protokol tersebut masih belum berhasil dalam memotong emisi gas karbon. Emisi gas karbon justru malah mengalami peningkatan.³⁷ Selain itu, tidak sedikit pula yang mengkritik efektivitas perjanjian ini. Salah satunya adalah dari Kanada yang mundur dari perjanjian ini pada 2011³⁸ karena merasa bahwa perjanjian ini tidak efektif. Anggapan tersebut timbul karena dua negara penghasil gas karbon terbesar, Tiongkok dan Amerika Serikat, tidak terlibat dalam perjanjian ini.³⁹

Protokol Kyoto bekerja mulai dari awal 2005 hingga akhir 2012.⁴⁰ Oleh karena itu, Protokol Kyoto berakhir pada 31 Desember 2012. Negara-negara yang terikat dalam Protokol Kyoto pun memperpanjang perjanjian tersebut. Mereka menandatangani

30. United Nations Framework Convention on Climate Change, "Conference of the Parties (COP)," (<http://unfccc.int/bodies/body/6383.php>), diakses 12 November 2017).

31. Acciona, "Achievements Of The Conference Of The Parties," (<http://www.activesustainability.com/climate-change/achievements-of-the-conference-of-the-parties/>), diakses 12 November 2017).

32. Belum pernah ada kasus yang demikian.

33. Pada 2001, UNFCCC mengadakan konferensi sebanyak dua kali, yaitu di Bonn dan Marrakech. Acciona, *op. cit.*

34. Minerva, "Conferences of the Parties (COP): a short history," (<http://www.minerva.unito.it/E/Climate/ClimateConferenceHistory.htm>), diakses 12 November 2017).

35. Maria Kruse, "Kyoto Protocol - important tool for sustainable development," (<http://www.fao.org/newsroom/en/news/2005/89781/index.html>), diakses 31 Januari 2018).

36. The Guardian, "What is the Kyoto protocol and has it made any difference?" (<https://www.theguardian.com/environment/2011/mar/11/kyoto-protocol>), diakses 12 November 2017).

37. Duncan Clark, "Has the Kyoto protocol made any difference to carbon emissions?" (<https://www.theguardian.com/environment/blog/2012/nov/26/kyoto-protocol-carbon-emissions>), diakses 31 Januari 2018).

38. CNN Library, "Kyoto Protocol Fast Facts," (<http://edition.cnn.com/2013/07/26/world/kyoto-protocol-fast-facts/index.html>), diakses 12 November 2017).

39. *Ibid.*

40. Diambil dari Protokol Kyoto.

perjanjian Amandemen Doha pada Desember 2012.⁴¹ Perjanjian yang menyepakati perpanjangan Protokol Kyoto hingga 2020 tersebut ditandatangani pada COP 18 yang diadakan di Doha, Qatar.⁴²

Selain memperpanjang, negara-negara anggota UNFCCC juga mempertegas rencana mereka pada COP 17 untuk membentuk kesepakatan baru yang komprehensif dan mengikat secara hukum pada 2015.⁴³ Pertemuan tersebut diadakan di Durban, Afrika Selatan pada 2011. Perjanjian baru tersebut juga akan melibatkan negara-negara penghasil gas rumah kaca, terutama negara penghasil gas rumah kaca terbesar yang tidak menandatangani Protokol Kyoto, untuk membatasi dan mengurangi emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya.⁴⁴ Negara-negara tersebut antara lain Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Hal tersebut kemudian benar-benar terwujud pada 2015, ketika COP 21 di Paris, Prancis. COP 21 menghasilkan Perjanjian Paris yang disepakati pada 12 Desember 2015 dan kemudian terbuka untuk ditandatangani pada 22 April 2016 hingga 22 April 2017.⁴⁵ Tujuan utama Perjanjian Paris adalah untuk memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim.⁴⁶ Tujuan tersebut diwujudkan dengan menahan angka peningkatan temperatur global di bawah 2° Celsius di atas tingkat pra-industrial dan

membatasi peningkatan suhu hingga 1,5° Celsius di atas tingkat pra-industrial.⁴⁷

Sayangnya, pelaksanaan sekuritisasi lingkungan ini menemui hambatan. Usaha negara-negara di dunia untuk menyelamatkan Bumi terganjal oleh adanya berbagai kelompok penyangkal perubahan iklim. Salah satu negara yang memiliki kelompok penyangkal perubahan iklim yang kuat adalah Amerika Serikat.

Para Penyangkal Perubahan Iklim di AS

Nyatanya, baik para penyangkal dan pegiat lingkungan mengharapkan terciptanya lingkungan yang baik yang dapat menyokong kehidupan manusia. Jean-Daniel Collomb menyebutkan bahwa keduanya sama-sama mengharapkan lingkungan yang berkelanjutan. Pegiat lingkungan berusaha melindungi Bumi dari degradasi akibat aktivitas manusia agar keberlangsungan semua makhluk hidup terjamin. Sedangkan bagi para penyangkal, Bumi dan sumber daya yang disediakannya harus tetap bertahan agar kebutuhan aktivitas industri mereka dapat terus berjalan.⁴⁸

Keberadaan penyangkal inilah yang lebih lanjut diulas oleh Collomb. Kemunculan gerakan penyangkal perubahan iklim di AS mulanya merupakan reaksi dari kebijakan-kebijakan negara federal yang

41. United Nations Framework Convention on Climate Change, "Status of the Doha Amendment," (http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php, diakses 12 November 2017).

42. The Editors of Encyclopædia Britannica, "Kyoto Protocol," (<https://www.britannica.com/event/Kyoto-Protocol>, diakses 12 November 2017).

43. *Ibid.*

44. *Ibid.*

45. United Nations Treaty Collection, "Paris Agreement," (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtidsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&lang=en&clang=en, diakses 13 November 2017).

46. United Nations Framework Convention on Climate Change, "UNFCCC eHandbook," (<http://bigpicture.unfccc.int/>, diakses 13 November 2017).

47. Disadur dari Persetujuan Paris

48. Jean-Daniel Collomb. *The Ideology of the Climate Change Denial in the United States*. European Journal of American Studies, 2014, hlm. 2

diusung oleh Theodore Roosevelt. Kala itu, pada awal abad ke-20, Roosevelt resah dengan aktivitas industri-industri yang mencemari lingkungan. Alhasil, ia membangun beberapa biro di bidang lingkungan seperti The US Reclamation Service (1902) dan US Forest Service (1905) untuk menjadikan tanah negara sebagai hak prerogatif pemerintah federal. Tugas biro-biro ini tidak lain adalah melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja industri.⁴⁹ Melihat ini, para pengusaha berlomba-lomba untuk melakukan privatisasi agar kepentingan mereka terjaga.

Isu lingkungan kala itu kurang begitu populer karena kesadaran mengenai isu tersebut baru terbangun sejak dimulainya pencemaran akibat aktivitas industri. Pada mulanya, pemilik-pemilik industri belum mempunyai kesatuan ideologi dan strategi agar kepentingan ekonomi mereka tetap terjaga. Namun, agenda mereka setelah itu tidak hanya melakukan adaptasi terhadap kebijakan-kebijakan para pegiat lingkungan. Mereka juga berupaya sebisa mungkin mempengaruhi pembuatan kebijakan agar tidak menghambat industri mereka. Bagi orang-orang libertarian ini, cara terbaik untuk menyelamatkan lingkungan adalah dengan memberikan kebebasan ekonomi tanpa intervensi pemerintah. Jay Wesley Richard dari Heritage Foundation menjadi salah satu tokoh yang mengamini pandangan ini;

“Hukum yang menjamin hak kepemilikan individu selalu menjadi cara yang terbaik agar dalam melakukan aktivitasnya, orang-orang lebih peduli terhadap lingkungan. Kita justru bertindak tanpa rasa tanggung jawab ketika kita tidak terdampak langsung oleh perbuatan kita.”⁵⁰

Jean-Daniel Collomb mengatakan bahwa usaha aktor-aktor pegiat lingkungan seperti IPCC dalam melaporkan penelitian mereka terkait lingkungan semakin terbukti dan tidak dapat dibantah. Ia berargumen bahwa kondisi inilah yang mendorong para penyangkal untuk mencari cara lain yang bisa dibilang lebih nyeleneh. Mereka berada di zona abu-abu, artinya tidak mendukung namun tidak terang-terangan menolaknya. Laporan-laporan tandingan tidak akan bisa mematahkan hasil penelitian IPCC. Alhasil, strategi tuduhan tak berdasar menjadi opsi yang dianggap paling efektif.

Para penyangkal lingkungan mengaitkan usaha-usaha tokoh-tokoh seperti Al Gore dan Obama sebagai suatu upaya untuk mendiskreditkan ekonomi AS. Hal ini sejalan dengan argumen Riley E. Dunlap. Dalam tulisannya, Dunlap mengatakan bahwa bukti-bukti ilmiah yang semakin valid memaksa para penyangkal perubahan iklim untuk mencari cara lain dalam menjegal usaha pegiat lingkungan.⁵¹ Mereka juga membangkitkan perdebatan isu-isu yang tak berkaitan seperti pernikahan sejenis, aborsi, dan legalitas senjata api. Collomb menyebutnya sebagai *culture wars*. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaring lebih banyak dukungan dari kalangan konservatif dan libertarian.

Perjalanan strategi perlawanan para penyangkal perubahan iklim menurut Collomb pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga periode. Pertama, sebelum perang dingin, kedua pasca Perang Dingin, dan ketiga era kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Collomb menyebutnya sebagai *ideological survival*. Hal ini tidak lain

49. *Ibid.*, hlm. 4

50. *Ibid.*

51. Riley E. Dunlap, *op. cit.*, 2013, hlm. 692

karena perlawanan ini menyangkut persepsi bagaimana idealnya AS menanggapi perubahan iklim.

Periode pertama yaitu sebelum Perang Dingin. Sebelum tahun 1960-an, isu lingkungan belum banyak dibicarakan apalagi terkait perubahan iklim. Satu-satunya perhatian pemerintah kala itu adalah pembuangan limbah industri-industri yang belum terkontrol. Sehingga mulai dari masa Roosevelt dan sesudahnya, pemerintah federal berusaha untuk mengelola hutan dan lahan negara bagian. Namun, para korporat ini kemudian menuduh bahwa kebijakan Washington sama halnya dengan mengingkari kesepakatan bersama yang membatasi kekuasaan negara federal. Seharusnya apa yang ada di dalam teritori negara bagian adalah hak negara bagian itu untuk mengelola dan membuat kebijakannya.⁵² Bagi para korporat, sudah sepatutnya sebagian besar kebijakan ditetapkan oleh pemerintah negara bagian.

Pada, periode kedua, masa Perang Dingin, para penyangkal tidak lagi dapat berdalih mengenai ada atau tidaknya perubahan iklim. Mau tidak mau mereka mengakui adanya perubahan iklim akibat ulah industri dan gaya hidup manusia. Bagi para penyangkal, satu-satunya strategi untuk menghadapi situasi ini adalah menggunakan isu rivalitas AS dan Uni Soviet.⁵³

Kala itu, AS dan Uni Soviet memang menjalani perlombaan untuk melihat siapa yang lebih superior. Oleh karena itu, sudah seharusnya AS tidak lengah sedikit pun jika tidak ingin diungguli Uni Soviet. Situasi inilah yang dimanfaatkan para penyangkal untuk mempengaruhi kebijakan lingkungan. Menurut Collomb, para penyangkal menuduh bahwa isu degradasi lingkungan adalah

agenda dari para sosialis untuk membunuh kapitalisme Barat. Slogan andalan “*green is the new red*” mengiringi setiap usaha ini.⁵⁴ Alhasil, mau tidak mau pemerintah AS tidak boleh membatasi industri kapitalis ini dengan kebijakan bertemakan lingkungan.

Ketiga, ketika Perang Dingin usai, ancaman eksternal kembali datang dan lagi-lagi menjadi peluang para penyangkal untuk menyusun strategi. RRT yang digadagadag sebagai kekuatan baru dunia tentunya mengancam posisi AS sebagai hegemon tunggal dunia terutama di kawasan Asia Pasifik. Dengan industri dan sumber daya manusia yang mumpuni, RRT mempunyai Produk Domestik Bruto hanya setingkat di bawah AS. Bukan tidak mungkin AS akan tersalip jika dalam waktu mendatang ia teledor. Dengan demikian, sangatlah wajar jika AS merasa terancam secara psikologis.

Bila dilihat melalui pendekatan neo-realisme, perilaku AS dalam mempertahankan status quonya adalah pilihan yang masuk akal demi menangkal ancaman RRT.⁵⁵ Dalam pendekatan neo-realisme, tindakan suatu negara tidaklah semata-mata disebabkan oleh kondisi domestik tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Pada kasus ini, kebangkitan RRT mengubah struktur kekuasaan yang sebelumnya didominasi AS. Sedangkan menurut John Mearsheimer, satu-satunya jalan untuk bertahan hidup dalam dunia yang anarki adalah dengan menjadi hegemon. Sebab dalam dunia yang anarki, tidak ada yang dapat menjamin suatu negara dapat bertahan. Negara harus bertumpu pada kemampuannya sendiri. Implikasinya adalah, kebijakan lingkungan yang membatasi produktivitas industri bukanlah opsi yang rasional jika AS masih

52. Steffen W. Schmidt dkk., *American Government and Politics Today: 2010-2011 Edition*, Massachusetts: Wadsworth, 2011, hlm. 50

53. Jean-Daniel Collomb, *op. cit.*, hlm. 6

54. *Ibid.*

55. Scott Burchill, dkk., *Theories of International Relations: Third Edition*, New York: Palgrave Macmillan, 2005, hlm. 42

ingin menjadi hegemon. Sebaliknya, AS harus mengakumulasi kekuatannya tidak hanya dalam hal militer, tetapi juga ekonomi. Terlebih, RRT berpotensi merebut pasar AS di Asia Pasifik. Situasi ini kemudian menjadi celah bagi para penyangkal untuk mempertahankan aktivitas industri mereka.

Dari ketiga babak ini, para penyangkal pada akhirnya mencapai satu kesimpulan bahwa segala kebijakan dan perjanjian internasional terkait lingkungan adalah hasil politisasi aktor-aktor yang ingin mendiskreditkan AS.⁵⁶ Di titik ini, kaum konservatif nasionalis mendaku sebagai garda terdepan untuk mempertahankan supremasi AS. Sedangkan oposisinya, yaitu Partai Demokrat dan pendukungnya, selalu berusaha kooperatif dengan perjanjian-perjanjian internasional seperti Persetujuan Paris. Polarisasi ini yang kemudian mewarnai politik AS dan persepsi publik terhadap perubahan iklim. Pemilu Presiden AS tahun 2016 adalah bukti bahwa kaum konservatif tidak bisa diremehkan. Dengan kelihaiannya menjaring massa melalui isu-isu populisme ditambah slogan “*Make America Great Again*”, Trump dan kubu konservatif mampu memenangi pemilu 2016, kendati Hillary lebih unggul dalam penghitungan *popular vote*.⁵⁷ Kemenangan inilah yang sekarang mengancam usaha yang telah dibangun para pegiat lingkungan.

Polarisasi dan Implikasinya pada Politik AS

Aaron M. McCright dan Riley E. Dunlap mengidentifikasi masyarakat sebagai arena bagi pertentangan nilai-nilai dan

kepentingan dalam melakukan aksi-aksi kolektif baik untuk lingkungan maupun kepentingan industri.⁵⁸ Di samping media dan *think tanks*, massa pendukung jelas merupakan instrumen penting dalam suatu kebijakan atau kepentingan politik terutama bagi AS sebagai negara demokrasi. Komposisi masyarakat AS yang sangat bipolar menjadi peluang bagi kampanye para penyangkal perubahan iklim. Hal ini tidak lain dipengaruhi oleh sistem bipartai yang diterapkan AS. Konsekuensinya, kedua kubu ini harus mampu menjaring dukungan kelompok-kelompok netral atau biasa disebut *swing voters* dalam pemilu jika ingin menguasai politik AS.

Apa yang terjadi di masyarakat selanjutnya tidak begitu penting pascapemilu. Masyarakat menjadi perhatian kedua kubu di masa-masa pemilu saja. Baik pemilu eksekutif maupun pemilu kongres adalah hal yang krusial bagi kedua kubu. Bahkan pemilu presiden bisa jadi opsi kedua karena kongres mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam urusan pembuatan kebijakan.

Dalam tulisannya yang berjudul *The Politicization of Climate Change and Polarization in the American Public's Views of Global Warming* (2011), McCright berusaha menunjukkan pengaruh polarisasi terhadap kondisi politik dan pembuatan kebijakan AS. Ia mengambil studi kasus peristiwa *Republican Revolution* di tahun 1994. Peristiwa tersebut adalah bukti bahwa kekuatan kongres mampu menahan kebijakan-kebijakan environmentalis eksekutif Al Gore dan Clinton.⁵⁹ Setelah Clinton terpilih, publik dan ilmuwan

56. Aaron M. McCright dan Riley E. Dunlap. *The Politicization of climate change and Polarization in The American Public's View of Global Warming, 2001-2010*, The Sociological Quarterly 52, 2011, hlm. 156

57. Zack Beauchamp. “What the conventional wisdom about Trump and working-class whites gets wrong,” (<https://www.vox.com/world/2016/11/22/13702842/donald-trump-working-class-whites>, diakses 31 Januari 2018).

58. Robert J. Brulle dan Riley E. Dunlap. *Climate Change and Society: Sociological Perspectives*, New York: Oxford University Press, 2015, hlm. 269

59. *Ibid.*, 158

berharap pemerintah lebih akomodatif dalam penetapan regulasi perlindungan lingkungan seperti pembatasan emisi dan gas rumah kaca. Namun, keadaan berbalik ketika Partai Republik memenangi pemilu parlemen setahun setelahnya. Partai Republik menguasai mayoritas kursi parlemen.

Dengan posisi strategis Partai Republik tersebut, kelompok konservatif dan ilmuwan kontrarian mampu mempengaruhi opini publik melalui *framing* pemberitaan media massa. Para penyangkal menekankan ketidakpercayaan mereka mengenai peran manusia dalam perubahan iklim. Akibatnya, publik di AS dapat dikategorikan abai terhadap permasalahan perubahan iklim. Jika dibandingkan rekannya di Eropa, masyarakat AS kurang memahami isu perubahan iklim dan lebih kontra terhadap perjanjian lingkungan seperti Protokol Kyoto.

Lebih lanjut lagi, McCright menyayangkan adanya pertentangan yang dibuat dari isu-isu kultural yang tidak berkaitan dengan persoalan lingkungan. Isu-isu seperti aborsi, pernikahan sejenis, isu pasar bebas, dan pembatasan intervensi pemerintah kemudian diangkat oleh para penyangkal perubahan iklim untuk menguatkan pertentangan ini. Sebagai kubu konservatif, tentu saja mereka mempunyai pandangan yang sama terhadap isu-isu ini sehingga agenda setiap kubu menjadi sangat jelas.

Hal inilah yang kemudian menjadi problem tersendiri bagi politik AS. Pertentangan antarkubu ini menjadi penghambat bagi sekuritisasi isu lingkungan dan cukup mengganggu bagi stabilitas AS sendiri. Dalam tiga hingga empat dekade terakhir, partai politik tertentu tidak akan bisa berkuasa lebih dari dua periode dalam pemilu

presiden, meski ada kemungkinan presiden dan kongres dari partai yang berseberangan.

Dampak Keberadaan Para Penyangkal Perubahan Iklim terhadap Kebijakan Politik AS

Adanya kelompok penyangkal perubahan iklim tentu saja dapat berpengaruh terhadap kebijakan politik yang diambil oleh Pemerintah AS. Hal itu semakin berpengaruh karena kelompok penyangkal memiliki kedekatan, bahkan keterlibatan langsung dalam pemerintahan. Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, maka para penyangkal semakin kuat dengan orang-orangnya di beberapa bagian strategis. Pertama, Trump menempatkan afiliasi politiknya pada Environmental Protection Agency (EPA).⁶⁰ EPA adalah agen yang dibentuk oleh pemerintah AS untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.⁶¹ Mereka menjalankan tugasnya dengan merancang dan mendorong jalannya regulasi berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh Kongres. EPA dibentuk pertama kali oleh Richard Nixon dan mulai bekerja pada 2 Desember 1970.

Dalam menjalankan tugasnya, EPA dipimpin oleh seorang administrator yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Kongres. Saat ini, Scott Pruitt merupakan Administrator EPA. Penunjukan Scott Pruitt menjadi Administrator EPA ini menjadi kontroversi karena sebelumnya, dia merupakan oposisi dari EPA dan dianggap dekat dengan perusahaan bahan bakar fosil.⁶² Cap tersebut didapatkan karena ia pernah membantu 28 negara bagian dalam menentang kebijakan Clean Power Plan.⁶³

60. Mazin Sidahmed, *op. cit.*

61. The Washington Times, "Topic-Environmental Protection Agency," (<https://www.washingtontimes.com/topics/environmental-protection-agency/>), diakses 6 Januari 2018).

62. Mazin Sidahmed, *op. cit.*

63. *Ibid.*

Pruitt pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait dengan perubahan iklim. Pruitt yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Oklahoma mempertanyakan laporan yang dikeluarkan oleh EPA mengenai ancaman perubahan iklim.⁶⁴ Laporan yang dikeluarkan pada Desember 2009 itu menyatakan bahwa gas rumah kaca, yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab perubahan iklim, dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia.⁶⁵ Gas rumah kaca tersebut antara lain karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrous oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), and sulfur heksafluorida (SF₆).⁶⁶

Laporan EPA tersebut menjadi dasar bagi Obama untuk mengesahkan kebijakan Clean Power Plan pada 3 Agustus 2015.⁶⁷ Kebijakan tersebut mendorong adanya pembangkit listrik yang menghasilkan lebih sedikit emisi karbon. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 32 persen dari angka emisi karbon 2005 pada 2030.⁶⁸ Kebijakan ini membatasi gerak perusahaan pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik bertenaga batu bara. Sumber daya energi tersebut dianggap sebagai penyumbang emisi karbon terbesar dalam menyebabkan perubahan iklim.

Namun, iktikad baik yang ditunjukkan oleh Obama tersebut digagalkan oleh Scott Pruitt, selaku Administrator EPA saat ini. EPA, di bawah pimpinan Pruitt, mengumumkan bahwa mereka mencabut kebijakan Clean Power Plan.⁶⁹ Kebijakan Pruitt tersebut dilatarbelakangi kebijakan Clean Power Plan oleh Mahkamah Agung AS yang belum disetujui.

Mahkamah Agung menanggukhan kebijakan tersebut karena adanya berbagai tuntutan yang dilancarkan oleh belasan negara bagian dan sejumlah perusahaan.⁷⁰ Kebijakan tersebut dianggap merugikan bagi perusahaan-perusahaan, serta menghambat kinerja ekonomi karena banyak penambangan batu bara yang terpaksa berhenti. Selain itu, Pruitt menuliskan bahwa AS akan mampu menyelamatkan uang sebesar 33 miliar Dolar AS jika kebijakan Clean Power Plan berhasil dicabut.⁷¹ Akan tetapi, EPA sampai saat ini masih belum memberi kejelasan mengenai pengganti kebijakan Clean Power Plan.

Selain mencabut kebijakan Clean Power Plan, Pruitt juga tidak lepas dari berbagai ungapannya mengenai perubahan iklim. Pruitt pernah menyatakan bahwa gas karbon bukanlah penyebab tunggal terjadinya perubahan iklim.⁷² Pruitt juga

64. Justin Worland, "Scott Pruitt Casts Doubt on EPA Document Showing The Dangers of Climate Change," (<http://time.com/4990265/scott-pruitt-clean-power-plan-epa/>), diakses 6 Januari 2018).

65. US Environmental Protection Agency, "Economics of Climate Change," (<https://www.epa.gov/environmental-economics/economics-climate-change>), diakses 6 Januari 2018).

66.. *Ibid.*

67. US Environmental Protection Agency, "Cutting Carbon Pollution from Power Plants," (<https://archive.epa.gov/epa/cleanpowerplan/fact-sheet-clean-power-plan-overview.html>), diakses 6 Januari 2018).

68. The New York Times, "What Is the Clean Power Plan, and How Can Trump Repeal It?" (<https://www.nytimes.com/2017/10/10/climate/epa-clean-power-plan.html>), diakses 6 Januari 2018).

69. Lisa Friedman dan Brad Plumer, "E.P.A. Announces Repeal of Major Obama-Era Carbon Emissions Rule," (<https://www.nytimes.com/2017/10/09/climate/clean-power-plan.html>), diakses 7 Januari 2018)

70. The New York Times, *op. cit.*, 2017.

71. *Ibid.*

72. Coral Davenport, "E.P.A. Chief Doubts Consensus View of Climate Change," (<https://www.nytimes.com/2017/03/09/us/politics/epa-scott-pruitt-global-warming.html>), diakses 7 Januari 2018).

meragukan bahwa perubahan iklim merupakan permasalahan yang ditimbulkan oleh manusia.⁷³ Selain itu, EPA di bawah komando Pruitt juga menghilangkan sejumlah penggunaan frasa “Climate Change” di situs web resminya.⁷⁴

Lalu, contoh yang kedua, Trump juga menempatkan penyangkal perubahan iklim di posisi lain, yaitu Rick Perry yang ditempatkan sebagai Menteri Energi AS oleh Trump. Rick Perry, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Texas, pernah mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak percaya pada penelitian-penelitian mengenai perubahan iklim.⁷⁵ Dia meyakini bahwa gas karbon bukanlah penyebab utama dalam perubahan iklim.⁷⁶

Selain pernyataan tersebut, Perry juga mengeluarkan kebijakan yang menganggarkan subsidi batu bara.⁷⁷ Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Perry karena ia percaya akan membawa dampak yang baik terhadap ekonomi maupun ketersediaan energi. Selain itu, kebijakan tersebut sejalan dengan pandangan Trump yang ingin membangkitkan kembali industri batu bara di AS.

Subsidi tersebut menjadi kontroversi karena dipandang akan menyalahi ekonomi liberal yang selama ini dianut oleh AS. Akan tetapi, terlepas dari sistem ekonomi liberal yang digunakan oleh AS, kebijakan

tersebut akan mendorong penggunaan batu bara sebagai energi. Selain kebijakan itu, kebijakan lain yang cukup kontroversial adalah penutupan Office of International Climate and Technology.⁷⁸ Penutupan itu menjadi kontroversi karena Departemen Energi tidak memberi keterangan yang jelas mengenai alasan penutupan.⁷⁹

Office of International Climate and Technology merupakan kantor yang bertugas untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan bersama dengan negara lain. Kantor tersebut bekerja di bawah Departemen Energi AS. Kebijakan penutupan itu dianggap mengancam berbagai kerja sama terkait pengembangan teknologi yang selama ini dibangun dengan negara lain.⁸⁰

Dengan adanya para penyangkal perubahan iklim di bagian strategis itulah, AS kemudian berubah haluan dalam posisinya dalam politik upaya menghadapi perubahan iklim. Sebelumnya, pada rezim kepemimpinan Barack Obama, AS memiliki visi yang sangat jelas dalam upayanya menghadapi perubahan iklim. AS berusaha menjadi garda terdepan dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Dengan AS yang dipimpinnya, Obama menjadikan wacana perubahan iklim sebagai fokus utamanya.⁸¹ Hal tersebut terlihat pada keterlibatan aktif AS pada perumusan Perjanjian Paris yang dilakukan

73. *Ibid.*

74. Madison Park, “EPA removes climate change references from website, report says,” (<https://edition.cnn.com/2017/12/08/politics/epa-climate-change-references/index.html>, diakses 31 Januari 2018).

75. Tom DiChristopher, “Energy Secretary Rick Perry says CO2 is not the main driver of climate change,” (<https://www.cnbc.com/2017/06/19/energy-sec-rick-perry-says-co2-is-not-the-main-driver-of-climate-change.html>, diakses 7 Januari 2018).

76. *Ibid.*

77. —, “Energy Secretary Rick Perry says CO2 is not the main driver of climate change,” (<https://www.cnbc.com/2017/06/19/energy-sec-rick-perry-says-co2-is-not-the-main-driver-of-climate-change.html>, diakses 7 Januari 2018).

78. Brad Plumer, “Energy Department Closes Office Working on Climate Change Abroad,” (<https://www.nytimes.com/2017/06/15/climate/energy-department-closes-office-working-on-climate-change-abroad.html>, diakses 7 Januari 2018).

79. *Ibid.*

80. *Ibid.*

81. Barack Obama, “Barack Obama on food and climate change: ‘We can still act and it won’t be too late,’” (<https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/26/barack-obama-food-climate-change>, diakses 7 Januari 2018).

pada COP 21 yang diadakan di Paris, 30 November – 13 Desember 2015.⁸²

Namun, upaya membangun pondasi dalam menghadapi perubahan iklim itu diganjil oleh Donald Trump. Terpilihnya Trump pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2017 seakan telah menggagalkan upaya yang dibangun oleh Obama bersama dengan pemimpin negara lainnya. Pengangkatan para penyangkal di berbagai posisi strategis tersebut hanyalah sebagian dari bagaimana pengaruh mereka bisa begitu kuat. Hal yang perlu diperhatikan adalah apa yang berada di balik mereka? Salah satu yang sudah begitu jelas adalah siapa yang menunjuk para penyangkal di posisi strategis, yaitu Donald Trump.

Donald Trump juga dikenal memiliki reputasi sebagai salah satu penyangkal perubahan iklim. Trump sudah berkali-kali menyatakan sikap skeptisnya terhadap wacana perubahan iklim. Seperti melalui berbagai cuitannya di akun Twitter miliknya⁸³ hingga pernyataan langsungnya baik ketika pidato maupun wawancara.

Selain itu, Trump juga menghapus wacana perubahan iklim dari strategi keamanan nasional.⁸⁴ Padahal, sebelumnya perubahan iklim merupakan salah satu fokus dalam strategi keamanan nasional pada rezim kepemimpinan Barack Obama. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong munculnya berbagai kebijakan yang kontradiktif dengan berbagai upaya yang sudah dibangun oleh AS selama ini dalam menghadapi perubahan iklim.

Lalu, mengapa keberadaan para penyangkal itu bisa menjadi faktor yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terlepas dari keberadaan Donald Trump yang merupakan seorang Presiden AS? Untuk memahami hal tersebut, mungkin kita bisa melihat sejenak bagaimana penjelasan C. Wright Mills dalam bukunya yang berjudul *The Power Elite* (1956). Melalui buku tersebut, Mills menjelaskan bahwa ada beberapa elite yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan pemerintahan di AS.

Mills menuliskan bahwa ada segelintir elite yang memiliki kekuasaan lebih daripada yang lain. Kekuasaan yang terkadang keberadaannya tidak disadari oleh masyarakat itu sebenarnya ada dan bahkan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Akan tetapi, elite tersebut bukanlah aktor tunggal. Mereka terbagi-bagi menjadi sejumlah institusi, yang masing-masing memiliki sejarah dan kultur berbeda. Menurut Mills, ada tiga institusi yang memiliki pengaruh sangat besar, antara lain institusi ekonomi, institusi politik, dan institusi militer.⁸⁵

Institusi ekonomi berawal dari sebuah unit produktif yang melakukan kegiatan produksinya sendiri secara kecil-kecilan. Akan tetapi, institusi ekonomi ini menjadi semakin besar, bahkan terdapat dominasi yang dilakukan oleh sekitar dua ratus hingga tiga ratus korporasi raksasa.⁸⁶ Korporasi raksasa tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar, baik dari aspek ekonomi maupun politik.

82. National Geographic Indonesia, "Resmi Ketuk Palu, Konferensi Perubahan Iklim Dunia Hasilkan Perjanjian Paris," (<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/12/resmi-ketuk-palu-konferensi-perubahan-iklim-dunia-hasilkan-perjanjian-paris>, diakses 7 Januari 2018).

83. Dylan Matthews, *op. cit.*

84. Julian Borger, "Trump drops climate change from US national security strategy," (<https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/18/trump-drop-climate-change-national-security-strategy>, diakses 7 Januari 2018).

85. C. Wright Mills, *The Power Elite*, Oxford: Oxford University Press, 1956, hlm. 7.

86. *Ibid.*

Mills menyebut korporasi raksasa ini dengan sebutan “*The Corporate Rich*”. Golongan ini muncul akibat dari sistem ekonomi kapitalisme yang memunculkan suatu golongan yang memiliki suatu industri. Pemilik industri tersebut kemudian berkembang menjadi suatu golongan tersendiri yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Dalam bukunya, Mills menceritakan bagaimana golongan korporasi itu menggunakan uang yang mereka miliki untuk membentuk “yayasan non-profit” untuk keuntungannya sendiri.

Dalam konteks pembahasan ini, golongan korporat ini memiliki peran besar dalam bagaimana para penyangkal perubahan iklim itu bisa muncul. Salah satu korporasi yang berperan besar dalam pembentukan wacana penyangkalan perubahan iklim tersebut adalah Exxon Mobil. Perusahaan minyak asal AS tersebut dianggap menyesatkan publik dalam membentuk wacana perubahan iklim.⁸⁷ Peneliti Harvard, Naomi Oreskes dan Geoffrey Supran, mengkaji sekitar 200 dokumen penelitian dan pernyataan publik yang dikeluarkan oleh ExxonMobil.⁸⁸ Kedua peneliti tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar dari dokumen tersebut menyesatkan publik.⁸⁹ ExxonMobil ini hanyalah salah satu dari banyaknya korporasi yang juga dikenal sebagai kelompok penyangkal perubahan iklim, seperti Koch Bersaudara dan lain-lain.

Dengan kekuatan uangnya yang sangat melimpah, korporasi tersebut kemudian membentuk lembaga-lembaga non-profit yang bertugas menjadi *think*

tank. Lembaga tersebut berisi para ilmuwan yang bertugas untuk memberi “legitimasi” terhadap apa yang dilakukan oleh para korporasi yang berperan dalam membentuk lembaga tersebut. Salah satu lembaga tersebut adalah Heartland Institute.

Heartland Institute yang dibentuk pada 1984 ini dikenal sebagai lembaga yang memiliki andil besar dalam membentuk wacana penyangkalan perubahan iklim. Lembaga itu mendapatkan banyak donasi dari berbagai korporasi, seperti Koch.⁹⁰ Selain itu, para penyangkal itu juga membentuk organisasi tandingan yang menandingi IPCC. Organisasi tersebut adalah Non-Governmental Panel on Climate Change.

Golongan korporat itu kemudian memunculkan golongan lain yang juga dituliskan oleh Mills dalam *The Power Elite* (1956). Golongan tersebut adalah “*The Chief Executives*”. Golongan ini merupakan orang-orang yang menjadi penggerak dalam industri yang dimiliki oleh korporasi-korporasi seperti yang sempat dijelaskan sebelumnya. Para eksekutif perusahaan ini sendiri terbagi menjadi tiga golongan, antara lain orang yang benar-benar memulai bisnisnya sejak awal, orang yang ditunjuk sebagai eksekutif karena memiliki ikatan keluarga dengan sang pemilik perusahaan, dan yang ketiga adalah orang yang tidak memulai bisnis tersebut sama sekali. Golongan ketiga ini merupakan profesional, yang sebagian besar merupakan pengacara, yang ditunjuk karena dianggap berkompeten.⁹¹

Keberadaan golongan-golongan yang memiliki kekuatan di institusi ekonomi tersebut kemudian memiliki pengaruh

87. John Schwartz, “Exxon Misled the Public on Climate Change, Study Says,” (<https://www.nytimes.com/2017/08/23/climate/exxon-global-warming-science-study.html>, diakses 7 Agustus 2018).

88. *Ibid.*

89. *Ibid.*

90. Suzanne Goldenberg, “Leak exposes how Heartland Institute works to undermine climate science,” (<https://www.theguardian.com/environment/2012/feb/15/leak-exposes-heartland-institute-climate>, diakses 7 Januari 2018).

91. Mills, *op. cit.*, hlm. 131.

yang sangat besar terhadap institusi politik. Institusi politik memiliki struktur yang birokratis, sehingga ada pengaruh dari bagaimana bentuk struktur pemerintahan. Di AS, ada sekelompok orang yang bisa mengeluarkan kebijakan eksekutif atas nama negara AS.⁹² Sekelompok orang tersebut terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para anggota kabinet yang terdiri dari kepala departemen, biro, agen, komisi, serta para staf kepresidenan.

Para pemangku kebijakan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses pengambilan kebijakan di AS. Akan tetapi, para pemangku kebijakan tersebut juga dikuasai oleh para penyangkal perubahan iklim, seperti misalkan orang-orang yang sempat kami singgung sebelumnya, yaitu Trump, Pruitt, dan Perry. Ketiga orang tersebut hanyalah beberapa contoh penyangkal perubahan iklim yang memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan kebijakan AS. Salah satu kebijakan AS mengenai perubahan iklim yang paling disorot adalah keluarnya AS dari Perjanjian Paris.

Kesimpulan

Perubahan iklim merupakan salah satu wacana utama dalam permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup menjadi semakin penting karena perkembangan wacana mengenai keamanan internasional. Saat ini, wacana tersebut tidak hanya melingkupi hal-hal tradisional yang berfokus pada negara sebagai subjek, tetapi juga kepada manusia sebagai individu. Isu lingkungan hidup yang dianggap semakin buruk ini dipandang memberi ancaman tersendiri bagi kehidupan umat manusia. Hal tersebut membuat dunia semakin waspada terhadap berbagai permasalahan perubahan iklim.

Akan tetapi, tidak sedikit pihak yang berupaya untuk menjegal usaha menghadapi perubahan iklim tersebut. Salah satu pihak tersebut adalah para penyangkal perubahan iklim. Para penyangkal tersebut memiliki kekuatan terutama di bidang finansial yang sangat melimpah. Kekuatan tersebut tidak lepas dari latar belakang para penyangkal tersebut yang mendapat sokongan dari sejumlah korporasi besar. Mereka menyangkal berbagai wacana mengenai perubahan iklim untuk melindungi kepentingan ekonominya. Mereka merasa bahwa wacana perubahan iklim dapat mengancam kelangsungan bisnisnya.

Para penyangkal tersebut bergerak di berbagai bidang, salah satunya adalah politik. Terdapat sejumlah penyangkal perubahan iklim yang terlibat dalam politik. Salah satu yang mencolok adalah Donald Trump. Terpilihnya Trump sebagai Presiden AS menghasilkan berbagai kebijakan yang kontroversial mengenai upaya AS dalam menghadapi perubahan iklim. Salah satunya adalah keluarnya AS dari Perjanjian Paris yang sebelumnya disepakati oleh AS pada masa kepemimpinan Barack Obama.

Keluarnya AS dari Perjanjian Paris akan semakin memperlambat upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. Sebab, Perjanjian Paris merupakan perjanjian yang dibentuk untuk menekan angka emisi karbon yang dihasilkan oleh negara-negara, terutama negara industri. Padahal, AS merupakan salah satu negara yang menghasilkan gas karbon terbesar di dunia. Hal tersebut dipastikan dapat menghambat upaya global dalam mengurangi emisi gas karbon yang merupakan penyebab utama dalam perubahan iklim.[]

92. *Ibid.*, hlm. 231.

Daftar Pustaka

- Acciona. *Achievements Of The Conference Of The Parties*. n.d. <<http://www.activesustainability.com/climate-change/achievements-of-the-conference-of-the-parties/>>.
- Beauchamp, Zack. *What The Conventional Wisdom About Trump and Working-Class Whites Get Wrong*. 22 November 2016. 31 Januari 2018.
- Borger, Julian. *Trump drops climate change from US national security strategy*. 19 Desember 2017. 7 Januari 2018. <<https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/18/trump-drop-climate-change-national-security-strategy>>.
- Brulle, Robert J. and Riley E. Dunlap. *Climate Change and Society: Sociological Perspectives*. New York: Oxford University Press, 2015.
- Burchill, Scott: et all. *Theories of Interational Relations: Third Edition*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Buzan, Barry, Ole Wæver and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner, 1998.
- Clark, Duncan. *Has the Kyoto protocol made any difference to carbon emissions?* 26 November 2012. <<https://www.theguardian.com/environment/blog/2012/nov/26/kyoto-protocol-carbon-emissions>>.
- CNN Library. *Kyoto Protocol Fast Facts*. 24 Maret 2017. <<http://edition.cnn.com/2013/07/26/world/kyoto-protocol-fast-facts/index.html>>.
- Collomb, Jean-Daniel. "The Ideology of Climate Change Denials in the United States." *European Journal of American Studies* (2014): 1-20.
- Davenport, Coral. *E.P.A. Chief Doubts Consensus View of Climate Change*. 9 Maret 2017. 7 Januari 2018. <<https://www.nytimes.com/2017/03/09/us/politics/epa-scott-pruitt-global-warming.html>>.
- DiChristopher, Tom. *Energy Secretary Rick Perry faces grilling over his proposal to subsidize coal and nuclear power generation*. 12 Oktober 2017. 7 Januari 2018. <<https://www.cnn.com/2017/10/12/energy-sec-perry-coal-and-nuclear-subsidies.html>>.
- . *Energy Secretary Rick Perry says CO2 is not the main driver of climate change*. 19 Juni 2017. 7 Januari 2018. <<https://www.cnn.com/2017/06/19/energy-sec-rick-perry-says-co2-is-not-the-main-driver-of-climate-change.html>>.

- Dunlap, Riley E. and Aaron M. McCright. "The Politization of Climate Change and Polarization in the Americans Public's View of Global Warming, 2001-2010." *The Sociological Quarterly* (2011): 155-194.
- Dunlap, Riley E. "Climate Change Skepticism and Denial: An Introduction." *American Behavioral Scientist* (2013): 691-898.
- Environmental Protection Agency. *Economics of Climate Change*. n.d. <<https://www.epa.gov/environmental-economics/economics-climate-change>>.
- . *FACT SHEET: Clean Power Plan Overview*. n.d. <<https://archive.epa.gov/epa/cleanpowerplan/fact-sheet-clean-power-plan-overview.html>>.
- Friedman, Lisa and Brad Plumer. *E.P.A. Announces Repeal of Major Obama-Era Carbon Emissions Rule*. 9 Oktober 2017. 7 Januari 2018. <<https://www.nytimes.com/2017/10/09/climate/clean-power-plan.html>>.
- Goldenberg, Suzanne. *Leak exposes how Heartland Institute works to undermine climate science*. 15 Februari 2012. 7 Januari 2018. <<https://www.theguardian.com/environment/2012/feb/15/leak-exposes-heartland-institute-climate>>.
- Harrington, Rebecca. *Business Insider*. 31 Mei 2017. <<http://www.businessinsider.sg/what-did-us-agree-to-paris-climate-deal-2017-5/?r=US&IR=T>>.
- Hough, Peter. "Environmental Security." Hough, Peter, et al. *International Security Studies: Theory and Practice*. New York: Routledge, 2015. 212-224.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. "IPCC Factsheet: What is the IPCC?" 30 Agustus 2013. *Intergovernmental Panel on Climate Change*. <http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/factsheets/FS_what_ipcc.pdf>.
- Kruse, Maria. *Kyoto Protocol - important tool for sustainable development*. 16 Februari 2005. <<http://www.fao.org/newsroom/en/news/2005/89781/index.html>>.
- Lerner, Brenda Wilmoth and K. Lee Lerner. *Environmental Science: In Context*. Detroit: Gale, 2009.
- Lovett, Jon C. "1997 Kyoto Protocol." *Journal of African Law* (2005): 94-96.

- Matthews, Dylan. *Donald Trump has tweeted climate change skepticism 115 times. Here's all of it.* 1 Juni 2017. <<https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/6/1/15726472/trump-tweets-global-warming-paris-climate-agreement>>.
- Meakin, Stephanie. *The Rio Earth Summit: Summary of the United Nations Conference on Environment and Development.* November 1992. 12 November 2017. <<http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp317-e.htm>>.
- Mills, C. Wright. *The Power Elite.* Oxford: Oxford University Press, 1956.
- Minerva. *Conferences of the Parties (COP): a short history.* n.d. <<http://www.minerva.unito.it/E/Climate/ClimateConferenceHistory.htm>>.
- National Geographic Indonesia. *Resmi Ketuk Palu, Konferensi Perubahan Iklim Dunia Hasilkan Perjanjian Paris.* 14 Desember 2015. <<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/12/resmi-ketuk-palu-konferensi-perubahan-iklim-dunia-hasilkan-perjanjian-paris>>.
- Obama, Barack. *Barack Obama on food and climate change: 'We can still act and it won't be too late'.* 26 Mei 2017. <<https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/26/barack-obama-food-climate-change>>.
- Park, Madison. *EPA removes climate change references from website, report says.* 8 Desember 2017. 31 Januari 2018. <<https://edition.cnn.com/2017/12/08/politics/epa-climate-change-references/index.html>>.
- Plumer, Brad. *Energy Department Closes Office Working on Climate Change Abroad.* 15 Juni 2017. <<https://www.nytimes.com/2017/06/15/climate/energy-department-closes-office-working-on-climate-change-abroad.html>>.
- . *The New York Times.* 7 Juni 2017. <<https://www.nytimes.com/2017/06/07/climate/trump-paris-climate-timeline.html>>.
- Schmidt, Steffen W., Mack C. Shelley II and Barbara A. Bardes. *American Government and Politics Today: 2010-2011 Edition.* Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2011.
- Schwartz, John. *Exxon Misled the Public on Climate Change, Study Says.* 23 Agustus 2017. 7 Agustus 2018. <<https://www.nytimes.com/2017/08/23/climate/exxon-global-warming-science-study.html>>.

- Sidahmed, Mazin. *The Guardian*. 15 Desember 2016. <<https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/15/trump-cabinet-climate-change-deniers>>.
- The Editors of Encyclopædia Britannica. *Kyoto Protocol*. 15 Desember 2017. <<https://www.britannica.com/event/Kyoto-Protocol>>.
- . *United Nations Conference on Environment and Development*. 20 Juli 1998. <<https://www.britannica.com/event/United-Nations-Conference-on-Environment-and-Development>>.
- The Guardian. *What is the Kyoto protocol and has it made any difference?* 11 Maret 2011. <<https://www.theguardian.com/environment/2011/mar/11/kyoto-protocol>>.
- The New York Times. *What Is the Clean Power Plan, and How Can Trump Repeal It?* 10 Oktober 2017. <<https://www.nytimes.com/2017/10/10/climate/epa-clean-power-plan.html>>.
- The Washington Times. *Topic - Environmental Protection Agency*. n.d. <<https://www.washingtontimes.com/topics/environmental-protection-agency/>>.
- The White House. *The White House*. 1 Juni 2017. <<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/01/statement-president-trump-paris-climate-accord>>.
- United Nations Framework Convention on Climate Change. *Conference of the Parties (COP)*. n.d. <<http://unfccc.int/bodies/body/6383.php>>.
- . *Status of the Doha Amendment*. n.d. <http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php>.
- . *UNFCCC eHandbook - Startpage*. n.d. <<http://bigpicture.unfccc.int/>>.
- United Nations. *Sustainable Development Knowledge Platform*. n.d. <<https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment>>.
- United Nations Treaty Collection. *Paris Agreement*. 15 Desember 2012. <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&lang=_en&clang=_en>.
- Worland, Justin. *Scott Pruitt Casts Doubt on EPA Document Showing the Dangers of Climate Change*. 20 Oktober 2017. <<http://time.com/4990265/scott-pruitt-clean-power-plan-epa/>>.